

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lingkungan merupakan udara, air, dan tanah tempat manusia, hewan, dan tumbuhan hidup (Cambridge Dictionary, n.d.). Lingkungan selalu dikaitkan dengan alam, karena sesungguhnya semua makhluk hidup berasal dari alam. Lingkungan dan alam menyediakan berbagai sumber daya yang menunjang berbagai makhluk di bumi untuk hidup. Sehingga lingkungan merupakan aspek vital bagi semua makhluk hidup untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Manusia sebagai makhluk yang diberkati akal dan pikiran oleh Tuhan Yang Maha Esa memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga lingkungan dibanding dengan makhluk hidup lain. Namun dalam beberapa dekade terakhir, kerusakan lingkungan dapat kita rasakan sendiri secara langsung. Seperti cuaca ekstrim, perubahan iklim yang sulit diprediksi dan tercemarnya berbagai sumber daya alam.

Kondisi ini dapat berdampak pada kerusakan ekosistem serta kepunahan spesies flora dan fauna dan ancaman terhadap kesehatan manusia. Kerusakan lingkungan dapat menjadi ancaman bagi keamanan manusia dan semua makhluk hidup di bumi. Polusi tanah, air dan udara, serta kerusakan lingkungan lainnya dapat merubah aktivitas manusia secara drastis. Inilah sebabnya definisi keamanan lingkungan seringkali lebih fokus terhadap penggunaan sumber daya secara berkelanjutan dan proteksi terhadap lingkungan disekitar manusia.

Selain itu, kerusakan lingkungan juga dapat berpotensi memunculkan konflik ketika lingkungan yang tidak dilindungi selaras dengan pengelolaan sumber daya yang buruk. Kondisi ini bahkan dapat menyebabkan ketidak-stabilan politik bahkan perselisihan antar negara (Græger, 1996).

Gerakan lingkungan kontemporer muncul di di akhir abad ke-19, dari keprihatinan tentang perlindungan pedesaan di Eropa dan hutan belantara di Amerika Serikat serta konsekuensi kesehatan dari polusi selama Revolusi Industri. Ideologi Liberalisme juga muncul dan menyatakan bahwa semua masalah sosial, termasuk masalah lingkungan, dapat dan harus diselesaikan melalui pasar bebas. Namun kebanyakan pemerhati lingkungan awal, percaya bahwa bukan pasar, melainkan pemerintah yang harus bertanggung jawab untuk melindungi lingkungan dan memastikan konservasi sumber daya berlangsung (Elliott, 2022).

Terdapat berbagai konferensi Internasional membahas berbagai isu lingkungan baik mengenai perubahan iklim, gas emisi, maupun manajemen limbah. Isu limbah dianggap sebagai salah satu isu penting pada permasalahan lingkungan. PBB bahkan memasukkan manajemen limbah menjadi salah satu tujuan dalam *SDG's (Sustainable Development Goals)*, tepatnya pada goal nomor 12, mengenai tanggung jawab konsumsi dan produksi (*Responsible Consumption & Production*). *Goal* tersebut tepat untuk diinisiasi karena setiap tahun, karena terdapat sebanyak 2,01 miliar ton limbah padat dihasilkan oleh wilayah perkotaan di dunia. Lalu setidaknya 33% dari jumlah limbah tersebut tidak dikelola dengan cara yang aman untuk lingkungan. Sampah yang dihasilkan per-orang setiap harinya di seluruh dunia rata-rata sebanyak 0,74 kilogram. Tetapi sampah yang dihasilkan di negara maju per orang dan per harinya berkisar antara 0,11 hingga

4,54 kilogram. Negara-negara berpenghasilan tinggi menghasilkan sekitar 34%, atau 683 juta ton limbah dunia (Kaza, Yao, Bhada-Tata, & Woerden, 2018).

Akibat dari banyaknya produksi limbah yang dihasilkan, praktik perdagangan limbah seringkali dilakukan oleh berbagai negara maju dengan mengirimkan limbahnya ke negara dunia ketiga untuk diolah, didaur ulang dan dimusnahkan. Sejak akhir 1990-an, tren pengiriman sampah plastik dari negara maju ke negara berkembang telah meningkat (Chen & Dinga, 2017). Menurut seorang aktivis lingkungan serta juru kampanye plastik di GAIA (*Global Alliance for Incinerator Alternatives*) asal Filipina bernama Beau Becongus, negara dunia pertama senang limbah mereka didaur ulang tetapi pada kenyataannya, limbah mereka berakhir di negara-negara yang tidak bisa menangani limbah. Sehingga polusi mengarah ke negara-negara dunia ketiga yang tidak memiliki kapasitas untuk mengelola limbah (Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutana Pemerintah Provinsi Banten, 2018).

Kemunculan plastik dimulai dari *post war boom* atau ledakan pasca-perang, dimana para ahli kimia dunia pada masa itu lebih berani menghasilkan bahan-bahan seperti pestisida, herbisida, dan plastik. Bungkus plastik yang murah dan portabel membuat sisa makanan terjaga kesegarannya lebih lama. Namun bungkus plastik berkontribusi terhadap krisis polusi plastik global. Sebab sulitnya plastik untuk didaur ulang, karena terbuat dari bahan kimia yang berpotensi berbahaya, terutama jika terurai di lingkungan (Gibbens, 2019).

Di Jepang, bungkus-membungkus barang merupakan sebuah budaya. Tradisi membungkus atau *tsutsumu* menyiratkan penghormatan kepada orang lain pada kesempatan pemberian hadiah, yang memberi arti khusus pada bahan

pembungkus dan barang yang dibungkus. Gagasan bahwa memberi seseorang barang yang tidak dibungkus dianggap tidak sopan berakar kuat di Jepang (Hamano, n.d.). Plastik dianggap sebagai teknologi untuk memudahkan masyarakat Jepang yang sibuk. Masyarakat Jepang dalam kesehariannya memakan makanan kemasan instan di supermarket atau melalui *vending machine* (mesin penjual otomatis), karena lebih praktis untuk pekerja kantoran di Jepang. Ini menjadi salah satu faktor tingginya volume limbah padat berupa plastik asal Jepang. Meningkatnya konsumsi produk kemasan di Jepang menyebabkan produksi sampah plastik dalam jumlah besar.

Dalam beberapa tahun terakhir, generasi sampah plastik per kapita di Jepang mencapai sekitar 37 kilogram, menjadikannya salah satu negara terbesar yang menghasilkan sampah plastik. Dalam beberapa tahun terakhir, Jepang adalah salah satu produsen produk plastik terbesar. Produk plastik terkemuka seperti film dan lembaran plastik sebagai wadah dan piring plastik yang digunakan sekali pakai banyak yang diproduksi di Jepang. Kemasan plastik biasanya digunakan untuk wadah makanan dan minuman karena memiliki citra aman dan higienis di kalangan warga negara Jepang. Selain itu, popularitas kotak makanan yang dapat dibawa pulang dari supermarket, serta mesin penjual otomatis dengan minuman dalam botol PET, berkontribusi pada timbulnya sampah plastik. Akibatnya, kemasan plastik menjadi mayoritas kemasan sampah rumah tangga. (Klein, 2021).

Meski Jepang merupakan salah satu produsen limbah plastik dalam jumlah besar, namun negara ini juga terkenal dengan negara yang bersih. Sebab, meski masyarakatnya banyak mengkonsumsi produk yang dibungkus plastik, mereka juga disiplin dalam memilah limbah rumah tangganya. Sehingga di Jepang,

berbagai jenis limbah tidak tercampur. Distribusi limbah yang cepat dan teknologi terdepan dalam pengelolaan limbah juga menjadi salah satu faktor negara Jepang terkenal dengan kebersihannya. Sebagai langkah untuk mengurangi timbunan sampah plastik, sejak tahun 2004 pemerintah Jepang juga giat mempromosikan inisiatif 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang mendorong pebisnis dan masyarakat Asia Pasifik untuk fokus pada pentingnya mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah (Ministry of the Environment Japan, 2014).

Jepang juga tidak mendaur ulang limbah padatnya menjadi produk baru, tetapi Jepang menggunakan teknologi insenerasi, dimana sampah dalam jumlah besar dibakar dan pembakarannya di daur ulang dalam bentuk energi. (Denyer, 2019). Limbah padat yang dihasilkan oleh masyarakat Jepang juga tidak seluruhnya diolah di Jepang, namun Jepang selama ini juga mengirimkan sampahnya ke luar negeri. Pasalnya mengekspor limbah ke negara lain lebih ekonomis dibanding biaya mengelola sampah dinegaranya sendiri. Tiongkok merupakan negara terbesar penerima impor limbah padat di dunia. Setelah 25 tahun mendaur ulang limbah padat dari berbagai negara di dunia, Tiongkok pada tahun 2018 resmi menolak untuk membeli skrap plastik daur ulang yang tidak murni (99,5%). Kondisi ini menjungkirbalikkan industri daur ulang global senilai 200 miliar dollar AS (Parker, 2018).

Akibatnya, muncul konsekuensi lingkungan baru karena imbas pada kebijakan pemberhentian impor limbah oleh Tiongkok. Dimana negara negara maju seperti Jepang, beralih mengirimkan limbahnya ke kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam, Indonesia, Thailand dan Malaysia. Kondisi ini menjadi masalah karena negara-negara berkembang di Asia Tenggara, karena belum memiliki

sistem yang efektif dalam mengelola limbah di negaranya sendiri (Kyodo, 2018). Contohnya Indonesia yang memiliki banyak tempat pembuangan akhir (TPA) yang kelebihan kapasitas. Salah satunya di Bantargebang, yang sudah mencapai 43-48 meter melebihi batas maksimal. Sampah yang dominan berasal dari sampah plastik yang mencapai 14%. Di Jakarta saja, sampah yang dikumpulkan ke Bantargebang setiap hari bisa melebihi 8.700 ton (Christiani, 2021). TPA Bantargebang masih mengandalkan sistem *open dumping*, yaitu membuang sampah di tempat terbuka. Namun, metode pembuangan ini berbahaya, karena dapat menyebabkan runtuhnya tumpukan dan pelepasan bahan kimia berbahaya ke udara. Indonesia juga berada di urutan kedua dalam hal membuang sampah plastik ke lautan dunia. Menurut sebuah Studi oleh University of Georgia, diperkirakan 3,22 juta metrik ton sampah plastik dibuang setiap tahun ke laut di sekitar Indonesia. Krisis sampah plastik tidak hanya terbatas pada lautan, tetapi juga berdampak pada sungai-sungai di Indonesia. Data dari Nature Communications mengungkapkan bahwa empat sungai di Indonesia – Brantas, Solo, Serayu, dan Progo – termasuk dalam 20 sungai paling tercemar di dunia (The ASEAN Post Team, 2018).

Kepentingan pihak pemerintah Indonesia akan praktik impor limbah padat dari Jepang ke Indonesia adalah penerapan ekonomi sirkular yang berkelanjutan, dengan mengurangi beban lingkungan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Salah satu implementasinya yaitu dengan mendorong sampah dan limbah, untuk diolah kembali dan didaur ulang atau dimanfaatkan menjadi sumber daya pada proses produksi, baik sebagai bahan baku maupun energi. Selain lebih ramah lingkungan, ekonomi sirkular juga mampu memberikan nilai tambah ekonomi,

menyediakan lapangan kerja, berkontribusi pada pembangunan, serta upaya mengatasi perubahan iklim (Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan, 2021). Dukungan dari pemerintah Indonesia dalam impor limbah padat asal Jepang disebabkan adanya peningkatan pertumbuhan PDB Indonesia yang berasal dari industri daur ulang. Penerapan konsep ekonomi hijau/sirkular dapat berpotensi menghasilkan 4,4 juta tambahan lapangan pekerjaan, dimana tiga perempatnya memberdayakan perempuan dengan kesempatan yang lebih baik pada tahun 2030 (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021).

Undang-undang mengenai limbah padat yang diperbolehkan untuk masuk ke Indonesia telah diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 230/MPP/Kep/7/1997 Tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya. Limbah padat yang legal untuk diimpor ke Indonesia adalah limbah non-B3 (Bahan Beracun Berbahaya). Diantaranya yaitu sisa, reja dan skrap dari plastik, ban luar bekas, bekas dan sisa kertas atau karton, limbah benang dan barang usang, pecahan dan sisa kaca, serta sisa dan buangan yang mengandung logam mulia (Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, 1997). Terdapat pula perjanjian *ASEAN+Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)* dan *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* yang mengatur tarif 0% untuk pengiriman berbagai limbah padat asal Jepang ke Indonesia. Komoditi limbah padat yang di impor Indonesia dari Jepang diantaranya adalah berbagai macam sisa atau skrap plastik, mika, kertas, macam-macam metal dan logam, kayu, kaleng, kaca, kain dan benang, serta karet. Menurut Kementerian Perdagangan Indonesia, limbah-limbah tersebut

berasal dari proses produksi atau pengolahan atau konsumsi di Jepang yang dapat dimanfaatkan kembali di Indonesia (Kementerian Perdagangan, 2018).

Meski Jepang bukan pengirim limbah padat terbanyak ke Indonesia, namun pada tahun 2020 volume ekspor sampah plastik dari Jepang ke Indonesia tercatat sebanyak 27 ribu metrik ton. Angka tersebut meningkat signifikan sejak 2017 (Klein, 2021b). Ini disebabkan karena para pengusaha industri daur ulang lebih memilih limbah impor karena lebih terjangkau, dibanding membeli dari pemulung. Perusahaan pengimpor limbah tersebut kebanyakan dari Jakarta, dan sebagian kecil berasal dari Surabaya dan Medan (Luthan, 1996). Perusahaan yang mengimpor harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Dirjen Perdagangan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan, antara lain rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perindustrian. Jika sudah lengkap dan benar, maka Dirjen Perdagangan akan menyetujui Impor Limbah Non B3 atau limbah padat (Evita & Galingging, 2020).

.Salah satu jenis limbah padat yang dikirim dari Jepang ke Indonesia adalah skrap plastik jenis PET. Permintaan kebutuhan plastik *Polyethylene Terephthalate* (PET) yang di Indonesia terus meningkat. PET biasanya terkandung dalam botol plastik, dan didaur ulang menjadi produk baru seperti benang atau botol plastik. Limbah botol plastik asal Jepang dianggap lebih berkualitas dari pada limbah botol plastik domestik yang memiliki kadar *intrinsic viscosity* (IV) rendah. Selain itu, masyarakat Jepang yang disiplin dalam memilah plastik membuat proses daur ulang menjadi lebih mudah karena label dan tutup botol telah dilepas dan dipisahkan dari limbah botol plastik (Purba, 2020).

Impor limbah padat asal Jepang ini dapat memberikan berbagai keuntungan ekonomi bagi Indonesia. Namun, sistem pengelolaan sampah di Indonesia belum berjalan secara maksimal, dengan angka daur ulang masih rendah yaitu 10%-20% (Ika, 2019). Sehingga dari sisi lingkungan, praktik impor limbah padat asal Jepang dapat menimbulkan ancaman serius bagi keamanan lingkungan di Indonesia. Sebab praktik impor limbah padat yang rentan akan kelalaian dan kebocoran yang dapat berimplikasi terhadap tercemarnya berbagai sumber daya alam di Indonesia. Sehingga tujuan Indonesia untuk menerapkan sistem ekonomi sirkular hijau yang berkelanjutan bersifat kontra-produktif ketika limbah yang didaur ulang didatangkan dari negara lain (Prasetiawan, 2019). Maka diperlukan analisa dan penelitian yang lebih menyeluruh dan mendalam mengenai **“Ancaman Impor Limbah Padat Asal Jepang Terhadap Keamanan Lingkungan Di Indonesia”** .

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, maka penelitian akan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana impor limbah padat asal Jepang ke Indonesia terjadi?
2. Bagaimana kondisi pengelolaan limbah padat di Indonesia?
3. Bagaimana akibat dari impor limbah asal Jepang terhadap keamanan lingkungan di Indonesia?

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini terfokus pada lonjakan volume pengiriman limbah padat asal Jepang ke Indonesia yaitu pada 2017 s/d 2021, ketika Tiongkok mengeluarkan kebijakan penutupan impor limbah dan Jepang beralih mengirimkan limbahnya ke

kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Topik penelitian ini juga dibatasi dengan resiko ancaman keamanan lingkungan di Indonesia, yang berdampak terhadap keamanan manusia dan ekonomi di Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka perumusan masalah akan diteliti sebagai berikut :

“Bagaimana impor limbah padat asal Jepang ke Indonesia berpengaruh terhadap pengelolaan limbah padat domestik yang mengancam kemananan lingkungan di Indonesia?”

1.5 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memaparkan faktor yang mendorong Indonesia untuk mengimpor limbah padat asal Jepang, serta aspek ancaman terhadap keamanan lingkungan di Indonesia yang dapat terjadi bila impor limbah padat asal Jepang terus didorong oleh kedua negara. Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk menjelaskan kebijakan dan kepentingan pemerintah dari kedua negara dalam praktik perdagangan limbah padat Internasional.

2. Kegunaan Penelitian

Untuk manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan menyumbangkan tulisan yang mengangkat isu mengenai keamanan lingkungan dalam kajian studi Hubungan Internasional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengetahuan mengenai kebijakan negara terhadap isu non-

tradisional. Sementara untuk manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat mendorong industri daur ulang untuk menyadari bahaya kelalaian dari daur ulang limbah padat. Masyarakat juga dapat menyadari mengenai pentingnya mengelola limbah domestik dan mengurangi produksi limbah padat rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pihak perumus kebijakan untuk memperbaiki sistem dan fasilitas daur ulang. Serta mendorong pemerintah untuk mengambil keputusan dalam pengembangan ekonomi sirkular dan pengembangan industri daur ulang yang lebih berfokus kepada pengelolaan limbah padat domestik demi kepentingan keamanan lingkungan nasional.